



**BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PEMATANGSIANTAR**

**2020
LAPORAN KINERJA**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintahan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pematangsiantar Tahun 2020 ini selesai disusun. LKj ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat LHK Pematangsiantar selama Tahun 2020. Penyusunan LKj ini sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BDLHK Pematangsiantar memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, tugas pokok, fungsi dan organisasi; Perencanaan kinerja yang meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja; Akuntabilitas Kinerja berisi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020.

Laporan Kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020 diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKj Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020 diucapkan banyak terima kasih. Semoga LKj ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebaik-baiknya.

Pematangsiantar, 11 Januari 2021
Kepala Balai



Manahan Simangunsong, S.Hut,T., M.Sc
NIP. 19750520 199403 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai amanah Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BDLHK Pematangsiantar berkomitmen terus menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja. Hal itu dikarenakan akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik.

BDLHK Pematangsiantar selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan diklat yang diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM pada bidang kepemimpinan, teknis dan administrasi yang memiliki komitmen dan moralitas yang tinggi. Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain melalui kegiatan penyelenggaraan diklat bagi SDM LHK baik aparatur dan non aparatur (masyarakat).

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Kegiatan yang telah dilaksanakan BDLHK Pematangsiantar selama Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BP2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: 1 Layanan
2. Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK: 660 Orang

3. Meningkatnya SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)
4. Berkembangnya Pengelolaan KHDTK sebagai sarana pembelajaran diklat: 66,50 Poin
5. Terwujudnya SDM Masyarakat yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari: 150 Orang
6. Terlaksananya gerakan masyarakat bela lingkungan oleh lembaga/komunitas
7. Terwujudnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata)

Selama Tahun anggaran 2020, Balai Diklat LHK Pematangsiantar mengalami pengurangan anggaran, dimana pagu awal sebesar Rp. 12.846.640.000,- menjadi Rp. 11.353.440.000,-. Hal ini terjadi karena adanya Pandemi Covid-19. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kinerja BDLHK Pematangsiantar pada Tahun 2020 mencapai Rp. 11.049.931.504,- (97,33 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	4
C. Sumber Daya Manusia	5
BAB. II. PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020-2024.	15
B. Rencana Kerja (Renja) Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020	17
C. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2020.....	22
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	24
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
B. Realisasi Anggaran	40
C. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut	42
BAB. IV. PENUTUP.....	43

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	6
Tabel 2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Tabel 3 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	8
Tabel 4 Keadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.....	8
Tabel 5 Sarana dan Prasarana Kantor dan Asrama BDLHK Pematangsiantar.....	9
Tabel 6 Sarana dan Prasarana KHDTK HD Pondok Buluh.....	13
Tabel 7 Indikator Kinerja Utama Program BP2SDM tahun 2020-2024.....	16
Tabel 8 Indikator Kinerja Kegiatan BP2SDM yang berkaitan dengan IKK BDLHK Pematangsiantar	17
Tabel 9 Rencana Kerja Tahunan BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020-2024	18
Tabel 10 IKK dan Pagu Indikatif BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020	22
Tabel 11 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020	25
Tabel 12 Hasil Pengukuran Efektivitas Capaian Kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020.....	26
Tabel 13 Hasil Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020	27
Tabel 14 Realisasi Diklat yang bersumber dari DIPA BDLHK Pematangsiantar	29
Tabel 15 Peserta Diklat di BDLHK Pematangsiantar Berdasarkan Jenis Kelamin	30
Tabel 16 Realisasi Diklat Kerjasama.....	31
Tabel 17 Daftar Pegawai Mutasi Tahun 2020.....	36
Tabel 18 Daftar Pegawai yang Mendapat Kenaikan Pangkat Tahun 2020	36
Tabel 19 Realisasi Pelatihan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Jumlah Generasi Muda Lingkungan Hidup Tahun 2020.....	39
Tabel 20 Realisasi Anggaran BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020.....	41

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Diklat LHK Pematangsiantar	6
Gambar 2 Grafik Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	7
Gambar 3 Grafik Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Gambar 4 Grafik Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	8
Gambar 5 Grafik Keadaan PPNPN berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Gambar 6 Peta KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh	12
Gambar 7 Sarana Prasarana di KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh	14
Gambar 8 Grafik Perbandingan Jumlah Diklat Klasikal, Full E-Learning, Blended Learning	30
Gambar 9 Grafik Peserta Diklat di BDLHK Pematangsiantar berdasarkan Jenis Kelamin.....	31
Gambar 10 Diklat Teknik Budidaya Lebah Madu	32
Gambar 11 Diklat Teknik Pembuatan Kompos dan Bokashi Pola 50 JP	30
Gambar 12 Diklat Pengelolaan SDAHL Bagi Tokoh Masyarakat Pola 80 JP.....	33
Gambar 13 Pelatihan Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang III Angkatan 5 dan 6.....	34
Gambar 14 Diklat Teknik Dalkarhutla Bagi Pemegang IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman/Restorasi Ekosistem	35
Gambar 15 Diklat GANIS PHPL Pengujian Kayu Bulat	35
Gambar 16 Pembentukan Kelompok Tani	37
Gambar 17 Survei Pendahuluan Burung Rangkok.....	37
Gambar 18 <i>In-House Training</i> Pengujian Getah	38
Gambar 19 Pembekalan Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan Asap Cair/Cuka Kayu sebagai Disinfektan Alami dalam Pencegahan Covid-19.....	38
Gambar 20 Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Partisipatif Berbasis Ponsel.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Penetapan Kinerja/ SKP Kepala Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020
- Lampiran 2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran s.d Desember 2020

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, bahwa dalam rangka pengurusan hutan secara lestari, diperlukan SDM yang berkualitas melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan LHK Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap program dan kegiatan dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dapat dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha,

dan masyarakat termasuk di dalamnya adalah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Diklat LHK Pematangsiantar sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh unit kerja. Sesuai dengan kewajiban yang digariskan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Balai Diklat LHK Pematangsiantar menyusun laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2020.

Penyusunan LKj dimaksud sebagai pertanggungjawaban secara administrasi baik fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020. Adapun tujuan dari penyusunan LKj adalah untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020 dan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan/reviu perencanaan pada waktu yang akan datang.

A. 1. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah BDLHK Pematangsiantar 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2020;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan LHK Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Rencana Strategis Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2020-2024;
10. Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2020;
11. Surat Pengesahan DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun Anggaran 2020 Nomor: Nomor: SP.DIPA-029.08.2.237640/2020 Tanggal 12 Nopember 2020.

A. 2. Batasan Pengertian

Dalam LKj Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/sekretariat badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- 2) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

- 3) Capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor, kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 4) Dampak adalah pengaruh kuat dari suatu kebijakan publik yang mendatangkan akibat/manfaat bagi masyarakat luas.
- 5) Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan pada satuan kerja.
- 6) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.
- 7) Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam pengembangan, pelaksanaan program/kegiatan.
- 8) Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah media pertanggungjawaban yang berisi mengenai capaian kinerja instansi pemerintah.
- 9) Misi adalah suatu yang harus diemba atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- 10) Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 11) Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu
- 12) Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih pendek dari tujuan.
- 13) Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Diklat LHK Pematangsiantar adalah unit pelaksana teknis dibidang pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki fungsi sebagai berikut:

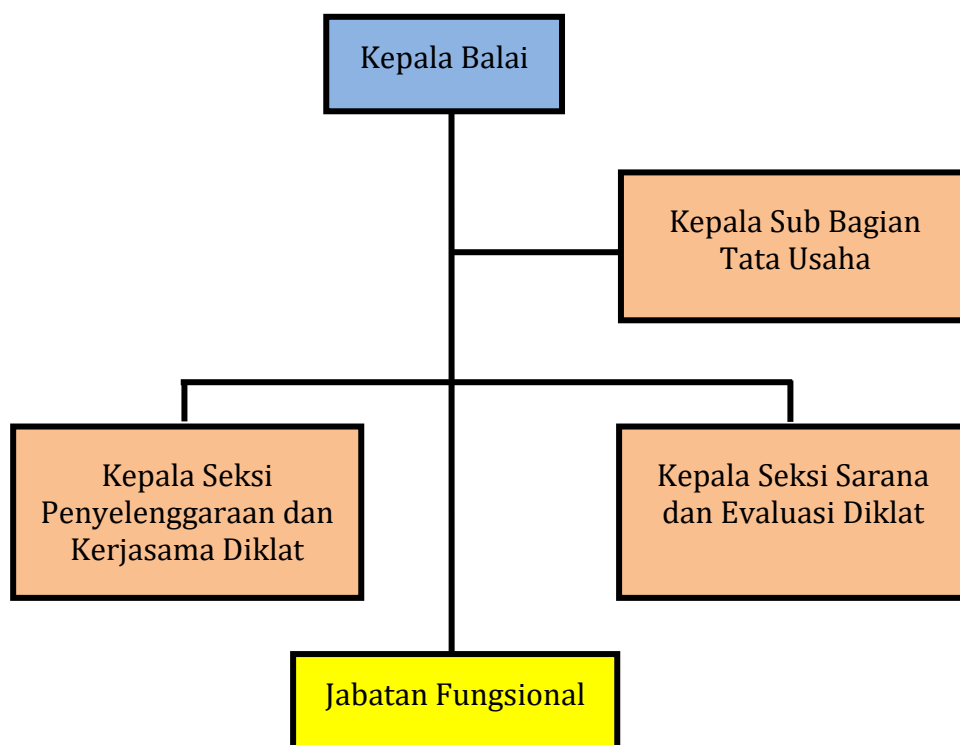
- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;
- g. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi di atas, Balai Diklat LHK Pematangsiantar terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat (IKD), penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan.
3. Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan serta pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing–masing berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

C. Sumber Daya Manusia

Balai Diklat LHK terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, dan Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan. Struktur organisasi Balai Diklat LHK Pematangsiantar sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

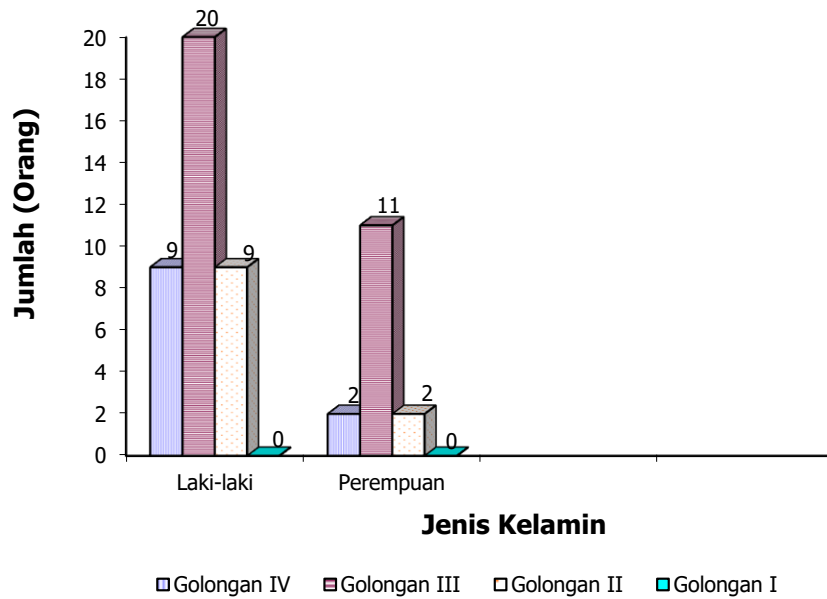


Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Diklat LHK Pematangsiantar

Jumlah pegawai BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020 (data pada Bulan Desember 2020) adalah sebanyak 77 orang, terdiri dari 53 orang PNS, 22 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan 2 orang Tenaga Bakti Rimbawan. Adapun PNS di BDLHK Pematangsiantar terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 4 orang, Pejabat Fungsional Widyaiswara sebanyak 11 orang, Fungsional Umum sebanyak 37 orang dan Tenaga Penyuluh Kehutanan 1 orang. Jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin

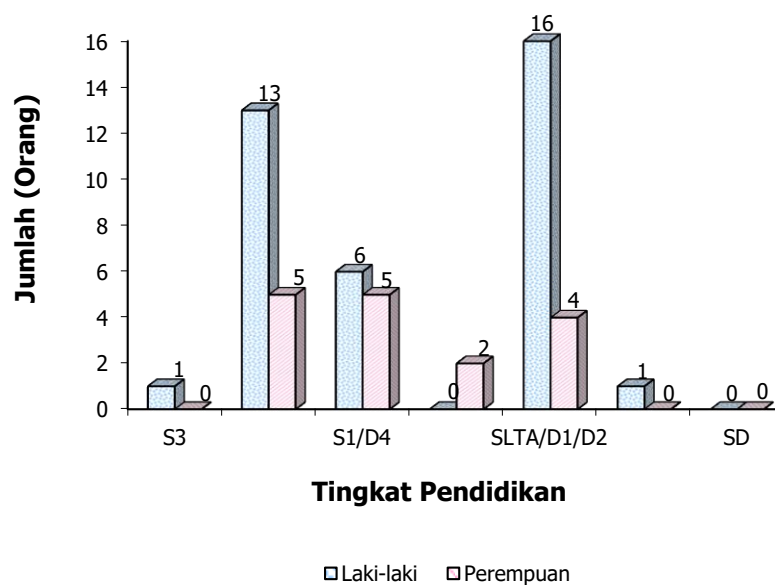
NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORG)
1	Golongan IV	9	2	11
2	Golongan III	20	11	31
3	Golongan II	9	2	11
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		38	15	53



Gambar 2. Grafik jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin

Tabel 2. Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

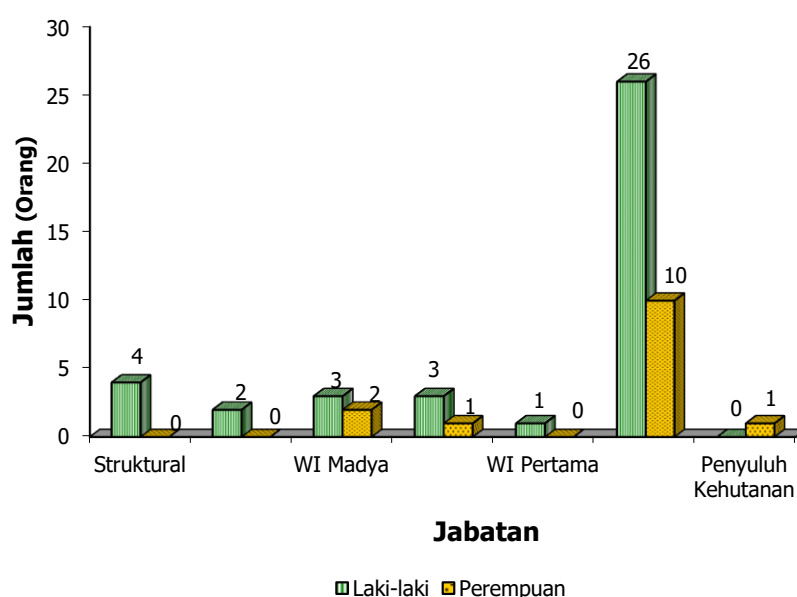
NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORG)
1	S3	1	-	1
2	S2	13	5	18
3	S1/D4	6	5	11
4	D3	-	2	2
5	SLTA/D1/D2	16	4	20
7	SLTP	1	-	1
8	SD	-	-	-
Jumlah		37	16	53



Gambar 3. Grafik jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

Tabel 3. Jumlah PNS berdasarkan jabatan dan jenis kelamin

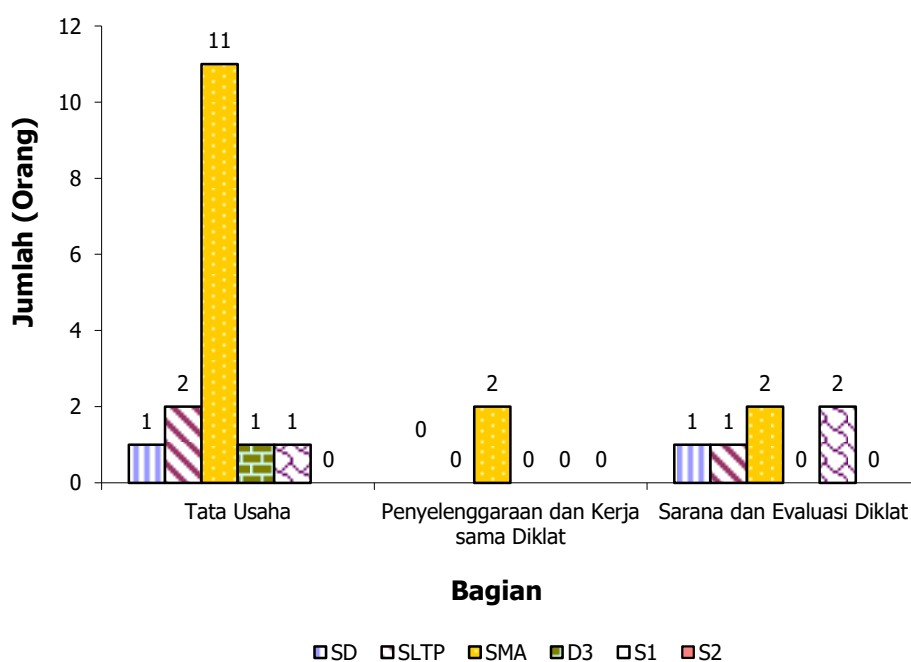
NO.	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORG)
1	Struktural	4	-	4
2	WI Utama	2	-	2
3	WI Madya	3	2	5
4	WI Muda	3	1	4
5	WI Pertama	1	-	1
6	Fungsional Umum	26	10	35
7	Penyuluh Kehutanan	-	1	1
Jumlah		39	14	53



Gambar 4. Grafik jumlah PNS berdasarkan jabatan dan jenis kelamin

Tabel 4. Keadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) Tahun 2020 di BDLHK Pematangsiantar

NO.	BAGIAN	PENDIDIKAN						JLH	KET
		SD	SLTP	SMA	D3	S1	S2		
1	Tata Usaha	1	2	11	1	1	-	16	
2	Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat	-	-	2	-	-	-	2	
3	Sarana Dan Evaluasi Diklat	1	1	2	-	2	-	6	
JUMLAH		2	3	15	1	3	-	24	



Gambar 5. Grafik keadaan PPNPN di BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan

1. Sarana dan Prasarana

1) Kantor dan Asrama BDLHK Pematangsiantar

Untuk mendukung kelancaran tugas, BDLHK Pematangsiantar dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran dan sarana transportasi sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Sarana dan prasarana kantor dan asrama BDLHK Pematangsiantar

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
	TANAH/GEDUNG/BANGUNAN				
1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	17,443	M2	v	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12,005	M2	v	
3	Gedung Pos Penjaga Permanen	3	Unit	v	
4	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya/Rumah Jaga Genset	38	M2	v	
5	Gedung Pos Jaga Permanen/Pos Keamanan KHDTK	2	Unit	v	
	PERALATAN DAN MESIN				
1	Portable Generating Set	1	Unit	v	
2	Full Body Harness	2	Unit	v	
3	Tali Kamantel Static	2	Unit	v	
4	Seat Harness	2	Unit	v	
5	Descender Figure og Eight	2	Unit	v	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
6	Webbing	1	Unit	v	
7	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1	Unit		v
8	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	Unit	v	
9	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5	Unit	4	1
10	Pick Up	2	Unit	v	
11	Sepeda Motor	8	Unit	7	1
12	Peralatan Tukang Besi Lainnya	2	Buah	v	
13	Alat Ukur Lainnya	2	Buah	v	
14	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	4	Buah	v	
15	Lemari Besi/Metal	19	Buah	v	
16	Lemari Kayu	125	Buah	77	48
17	Rak Besi	4	Buah	v	
18	Rak Kayu	26	Buah	v	
19	Filing Cabinet Besi	57	Buah	54	3
20	Brandkas	4	Buah	v	
21	Movitex Board	2	Buah	v	
22	White Board	8	Buah	v	
23	Copy Board/Elektric White Board	1	Buah	v	
24	Mesin Absensi	3	Buah	v	
25	LCD Projector/Infocus	5	Buah	v	
26	Flip Chart	6	Buah	v	
27	Perkakas Kantor Lainnya	65	Buah	33	32
28	Meja Kerja Besi/Metal	133	Buah	v	
29	Meja Kerja Kayu	355	Buah	133	222
30	Kursi Besi/Metal	274	Buah	v	
31	Kursi Kayu	202	Buah	v	
32	Sice	11	Buah	v	
33	Meja Rapat	41	Buah	v	
34	Meja Komputer	16	Buah	v	
35	Tempat Tidur Kayu	49	Buah	v	
36	Meja Ketik	3	Buah	2	1
37	Kasur/Spring Bed	97	Buah	v	
38	Meja Makan Kayu	70	Buah	v	
39	Nakas	-	Buah	-	
40	Meja Tamu Asrama	32	Unit	v	
41	Kursi tamu Asrama	96	Unit	v	
42	Meja Hidang (dapur)	2	Unit	v	
43	Meja Tempat Snack	3	Unit	v	
44	Meja Hidang (dapur)	2	Unit	v	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
45	Sofa Kantor	3	Unit	v	
46	Kursi Kantor	2	Unit	v	
47	Kursi tamu Asrama	32	Unit	v	
48	Meja Tamu Asrama	96	Unit	v	
49	Kursi Kantor	2	Unit	v	
50	Pemanas Nasi	3	Unit	v	
51	Mesin Pompa Air	-	Unit	-	
52	Tempat Penampungan Sementara	-	Unit	-	
53	Rak Piring Alumunium	1	Buah	v	
54	Televisi+Parabola	4	Buah	v	
55	Lemari Es	3	Buah	v	
56	Timbangan Barang(kapasitas 150 kg)	1	Buah	v	
57	Peralatan Outbond	2	Buah	v	
58	Jam Elektronik	4	Buah	v	
59	Digital LED Running Text	1	Buah	v	
60	Dispenser	6	Buah	v	
61	Blender	1	Buah	v	
62	Kompore Gas (Alat Dapur)	4	Buah	v	

2) KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh

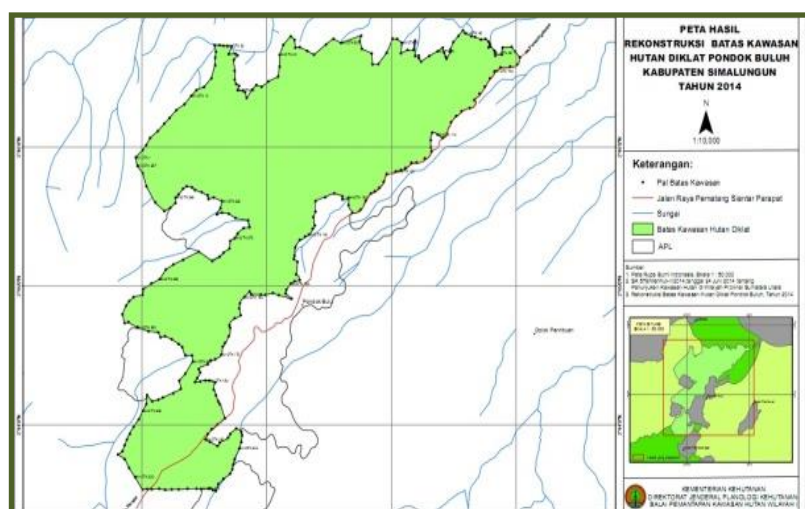
Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat Pondok Buluh yang merupakan sarana pembelajaran pendukung kegiatan kediklatan di BDLHK Pematangsiantar dan ada sejak tahun 1985. Ketika itu, areal yang dimaksud merupakan Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH) di Kabupaten Simalungun.

Selanjutnya, oleh Dirjen Kehutanan ditunjuk sebagai Hutan Diklat melalui SK Dirjen Kehutanan Nomor: 34/KPTS/DJ/I/1983 Tanggal 8 Februari 1983 dengan luas \pm 800 Ha. Pada Tahun 1988, Hutan Diklat ini mendapatkan tambahan areal seluas \pm 300 Ha berdasarkan SK Menhut Nomor: 398/Kpts/1988 Tanggal 4 Agustus 1988. Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1030/Menhut-VII/KUH/2015 Tanggal 20 April 2015 Tentang Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Hutan Lindung, ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Hutan Diklat Pondok Buluh seluas 1.272,70 Ha, sebagaimana disajikan pada Gambar 6.

Beberapa jenis flora yang banyak dijumpai di lapangan diantaranya Pinus, Meranti, Puspa, Rasamala, Sampinur, Hapas-Hapas, Aren, Kemenyan, Bambu, Medang, Mayang, Anggrek Hutan, dan lain sebagainya. Potensi satwa pada umumnya belum terinventarisir dengan baik, tetapi hasil pengamatan yang sudah pernah dilakukan dan frekwensi kemunculan, yang sering terlihat antara lain Monyet, Siamang, Rusa, Burung Elang, Lipan, Biawak, Burung Balam, Ular, Kadal, Babi Hutan, Ayam Hutan, Burung Enggang, Trenggiling, dan lain-lain.

Sarana prasarana penunjang diklat di KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh yang pengelolaannya berada di bawah BDLHK Pematangsiantar terdiri dari demplot persemaian seluas 1 Ha, demplot agroforestry seluas 4 Ha, demplot hasil hutan bukan kayu (HHBK) seluas 2 Ha, arboretum seluas 2 Ha, demplot meranti seluas 2 Ha, demplot pengawetan tanah seluas 2 Ha, areal demplot MPTS dan demplot lebah madu, serta jalur interpretasi pengamatan burung sepanjang 1 Km.

KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh adalah salah satu kawasan yang dilintasi apabila menuju kawasan wisata Danau Toba. Pondok Buluh juga memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sebagai destinasi kegiatan wisata khususnya untuk mendukung Program Otortitas Kawasan Danau Toba, antara lain *Outbound, Climbing, Trekking, Bird Watching* dan jenis kegiatan wisata lainnya.



Gambar 6. Peta KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh

Sarana dan prasarana KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menunjang kediklatan, secara umum sarana dan prasarana KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sarana dan prasarana KHDTK HD Pondok Buluh pada Tahun 2020

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Ruang Kelas	2	Unit	v	
2	Ruang Makan/Snack	1	Unit	v	
3	Dapur	1	Unit	v	
4	Asrama	1	Unit	v	
5	Mushola	1	Unit		v
6	Gudang	1	Unit		v
7	Pos Jaga	2	Unit	v	v
8	Pondok Kerja	1	Unit		v
9	Demplot Persemaian	1	Ha	v	
10	Demplot Agroforestry	4	Ha	v	
11	Demplot Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	2	Ha	v	
12	Demplot Meranti	2	Ha	v	
13	Demplot Pengawetan Tanah	2	Ha	v	
14	Arboretum	2	Ha	v	
15	Petak Ukur Permanen	1	Ha	v	
16	Areal Ekowisata	1	Ha	v	
17	Areal Camping Ground	2	Ha	v	
18	Jalur Tracking	3	Km	v	
19	Sarana Prasarana Outbond	1	Set	v	
20	Demplot MPTS	1,5	Ha	v	
21	Demplot Lebah Madu	1	Ha	v	
22	Pompa Pemadam	2	Unit	v	
23	Selang Pemadam	7	Unit	v	
24	Nozel Kuningan Pernekel (Sambu Ponti)	2	Unit	v	
25	Jet shooter	9	Unit	v	
26	Demplot Bambu	1,3	Ha	v	



Jalur Interpretasi



Gazebo



Gambar 7. Sarana-Prasarana di KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024

Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan dapat dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk di dalamnya adalah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Diklat LHK Pematangsiantar selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan diklat yang diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM pada bidang kepemimpinan, teknis, dan administrasi yang memiliki komitmen dan moralitas yang tinggi. Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain melalui kegiatan penyelenggaraan diklat bagi SDM LHK baik aparatur dan non aparatur (masyarakat). Berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, aparatur dan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibutuhkan saat ini adalah SDM yang memiliki 4 kriteria, yaitu:

- (1) integritas moral yang tinggi (jujur),
- (2) kemampuan profesionalisme,
- (3) kemampuan kepemimpinan (*leadership*), dan
- (4) kemampuan bekerja sama dalam tim yang solid.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2020-2024 adalah "KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan."

Rencana Strategis BDLHK Pematangsiantar tidak dapat dipisahkan dari Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator kinerja Utama (IKU) Badan P2SDM Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Sesuai tugas dan fungsi organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, maka seluruh aktivitas kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang akan dilaksanakan unit organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM selama periode Tahun 2020-2024 ditampung dalam Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Program Badan P2SDM Tahun 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Program	Indikator Output Program
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Diklat 	<ul style="list-style-type: none"> KHDTK yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat.
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> SDM LHK yang meningkat kompetensinya SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya Lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia Kelompok Tani Hutan Mandiri Lembaga/komunitas yang melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata)
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BP2SDM 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Lingkup BP2SDM 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP BP2SDM

Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan BP2SDM Tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan IKK pada Balai Diklat LHK Pematangsiantar

Program	Indikator Kinerja Utama BP2SDM	Indikator Kinerja Kegiatan BP2SDM
1. Program peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM • Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Non LHK • Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BP2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi, untuk menjamin kinerja yang optimal • SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya • SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3) • Pengelolaan KHDTK sebagai sarana pembelajaran diklat • SDM Masyarakat yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari • Lembaga/komunitas yang melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan • Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata)

Keterangan:

Indikator Kinerja Kegiatan yang dicetak tebal merupakan IKK BP2SDM yang sesuai dengan IKK Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020-2024.

B. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020

Rencana Kerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020 mengacu pada Renstra Badan P2SDM Tahun 2020-2024 yang disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Rencana Kerja Tahunan BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETAIL	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
029.08.10	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM												
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM												
5439.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I												
5439.950.006	Layanan Dukungan Manajemen pada Balai Diklat LHK												
051	<i>Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran</i>												
A)	Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	■											
B)	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran							■		■			
C)	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan				■			■					
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi												
A)	Sistem Pengawasan Internal Pemerintah / SPIP			■			■			■			■
057	Pengelolaan Kepegawaian												
A)	Tata Administrasi Kepegawaian				■						■		
B)	Pengembangan Organisasi		■		■		■				■		

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETAIL	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
058	Pelayanan Umum dan Perlengkapan												
A)	Majalah/ Buletin												
B)	Leaflet												
C)	ISO 9001 : 2015												
5441.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)												
053	<i>Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</i>												
532111	<i>Belanja Modan Peralatan dan Mesin</i>												
054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan												
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan												
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan												
5439.994	LAYANAN PERKANTORAN												
5439.994.001	Layanan Perkantoran												
001	<i>Gaji dan Tunjangan</i>												
A)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan												
002	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>												

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETAIL	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
A)	Perawatan Gedung Kantor			■			■			■			■
B)	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4		■			■			■			■	
C)	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2			■			■			■			■
D)	Perawatan Sarana Gedung dan Bangunan	■			■			■			■		
E)	Perawatan Jaringan		■				■			■			■
F)	Langganan Daya dan Jasa												
G)	Tunjangan Pengelolaan Kegiatan Perkantoran												
H)	Operasional Perkantoran												
5441	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK												
5441.001	SDM Aparatur dan Non Apratur yang meningkat kapasitasnya												
051	<i>Diklat Teknis dan Fungsional</i>												
A)	Diklat Teknik Budidaya Lebah Madu , 30 Orang, 7 Hari, 1 Angk (NAP)		■										
B)	Diklat Pembuatan Bokashi, 30 Orang, 6 Hari, 1 Angk (NAP)			■									
C)	Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, 30 Orang, 5 Hari, 1 Angk (AP)						■						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETAIL	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
D)	Diklat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, 30 Orang, 8 Hari, 1 Angk (AP)							■					
E)	Diklat Pengembangan Kewirausahaan Bagi KKPH, 30 Orang, 7 Hari, 1 Angk (AP)						■						
F)	Diklat Teknik Pengelolaan HHBK, 30 Orang, 8 Hari, 1 Angk (AP)							■					
G)	Diklat Pengelolaan SDAHL Bagi Tokoh Masyarakat, 30 Orang, 10 Hari, 1 Angk (NAP)			■									
H)	Diklat Interpretasi Wisata Alam, 30 Orang, 8 Hari, 1 Angk (AP)			■									
I)	Diklat SIG Berbasis Ponsel, 30 Orang, 7 Hari, 1 Angk (AP)				■								
J)	Diklat Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHP dan KPHL, 30 Orang, 9 Hari, 1 Angk (AP)				■								
K)	Diklat Alih Tingkat Penyuluh Kehutanan Terampil ke Penyuluh Kehutanan Ahli, 30 Orang, 10 Hari, 1 Angk (AP)							■					
054	Pendukung Kediklatan												
A)	Pengelolaan Administrasi Kediklatan		■										
B)	Peningkatan Tenaga Kediklatan		■										

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETAIL	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
C)	Identifikasi Kebutuhan Diklat / IKD												
D)	Evaluasi Pasca Diklat / EPD												
E)	Penyempurnaan Kurikulum dan Silabus Diklat												
5441.003	Nilai KHDTK yang dikelola (Base Line)												
051	<i>Pengembangan KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan</i>												
A)	Honorarium Tenaga Bakti Rimbawan												
B)	Operasional KHDTK												
C)	Patroli Pengamanan KHDTK												
D)	Pemeliharaan Demplot												
E)	Pengembangan Ekowisata Tahap 1												
F)	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KHDTK, 2 Kegiatan												
G)	Pengelolaan Arboretum												
5443	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup												
5443.001	SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari												
051	<i>Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>												

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETAIL	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
A)	Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Aren, 30 Orang, 3 Hari												
B)	Pelatihan Budidaya Lebah Madu, 30 Orang, 3 Hari												
C)	Pelatihan Teknik Refrigerasi, 30 Orang, 3 Hari												
D)	Pelatihan Pengambilan Sampel Air, 30 Orang, 3 Hari												
E)	Pelatihan Pengambilan Sampel Udara, 30 Orang, 3 Hari												
F)	Dukungan Pelatihan Masyarakat Bidang LHK												

Rencana kerja (Renja) BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan/usulan rencana kerja dan anggaran. Pagu anggaran BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020 merupakan batas atas belanja dalam penyusunan rencana/usulan kegiatan tahun berjalan. Pagu Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020 mengalami perubahan, dimana pagu awal sebesar Rp. 12.846.640.000,- menjadi Rp. 11.353.440.000,-.

Dari alokasi pagu tersebut telah diusulkan rencana kerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020 berdasarkan IKK sebagaimana disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. IKK dan pagu defenitif Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Pagu Indikatif (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BP2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi, untuk menjamin kinerja yang optimal a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal c. Layanan Perkantoran	284.740.000 700.000.000 8.900.000.000
2	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Non LHK	SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK Meningkatkan Kapasitasnya Nilai KHDTK yang dikelola	1.863.900.000 500.000.000
3	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari	598.000.000
JUMLAH			12.846.640.000

D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

Penetapan kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar telah ditandatangani oleh Sekretaris Badan P2SDM dan Kepala Balai Diklat LHK Pematangsiantar pada

bulan Januari Tahun 2020 yang dituangkan dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang disajikan pada lampiran 1.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Pada Tahun 2020, Balai Diklat LHK Pematangsiantar mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 12.846.640.000,- (Dua belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 11.353.440.000,- (Sebelas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) karena terjadi Pandemi Covid-19. Namun sejalan dengan pengurangan anggaran tersebut, tidak menyebabkan perubahan dalam output IKK BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020.

Pengukuran Kinerja Badan P2SDM didasarkan pada komponen pengukuran capaian kinerja, efektivitas capaian kinerja dan efisiensi capaian kinerja.

Kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar didasarkan pada tiga komponen pengukuran yaitu:

- a. Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Efektivitas Capaian Kinerja
- c. Efisiensi Capaian Kinerja

Adapun uraian setiap komponen pengukuran capaian kinerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2020, Balai Diklat LHK Pematangsiantar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu terselenggaranya peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan yang akan dicapai dengan empat indikator kinerja kegiatan. Capaian realisasi pada akhir Tahun 2020 menunjukkan bahwa target semua indikator kinerja kegiatan tercapai. Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja utama. Hasil pengukuran rata-rata kinerja

Balai Diklat LHK Pematangsiantar pada Tahun 2020 adalah sebesar 97,33 %. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil pengukuran capaian kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020

Program	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		% Capaian
			Jlh	Sat	Jlh	Sat	
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BP2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi, untuk menjamin kinerja yang optimal					
		a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	layanan	1	layanan	99,86
		b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	layanan	1	layanan	100
		c. Layanan Perkantoran	1	layanan	1	layanan	96,61
	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK Meningkatkan Kapasitasnya	660	Orang	660	Orang	99,87
		Nilai KHDTK yang dikelola	66,50	Poin	66,50	Poin	99,98
	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari	150	orang	150	orang	100
Rata-rata capaian kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020							97,33

b. Efektivitas Capaian Kinerja

Hasil pengukuran efektivitas capaian kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Pengukuran Efektivitas Capaian Kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Vol/ Sat	Realisasi Thn 2019	Realisasi Thn 2020	% Capaian Thn 2019	% Capaian Thn 2020	Efektivitas Capaian Kinerja	
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BP2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi, untuk menjamin kinerja yang optimal							
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	0	1	0	100	1	
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100	100	1	
		Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	100	1	
	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK Meningkatkan Kapasitasnya	Org	300	660	100	100	1	
		Nilai KHDTK yang dikelola	Unit Poin	1	66,50	100	100	1	
	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari	Org	120	150	100	100	1	
	Rata-rata Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2020						100	100	1,00

Berdasarkan Tabel 12, menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas capaian kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar pada Tahun 2020 = 1. Rasio = 1 ini menunjukkan bahwa efektivitas capaian kinerja tahun berjalan adalah tetap atau sama dengan tahun sebelumnya.

c. Efisiensi Capaian Kinerja

Hasil pengukuran efisiensi capaian kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja Fisik	% Capaian Kinerja Keuangan	Efisiensi Capaian Kinerja
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BP2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi, untuk menjamin kinerja yang optimal			
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	100	99,86	1,00
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100	100	1,00
		Layanan Perkantoran	100	96,61	1,04
	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK Meningkatkan Kapasitasnya	100	99,87	1,00
		Nilai KHDTK yang dikelola	100	99,98	1,00
	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari	100	100	1,00
Rata-rata Efisiensi Capaian Kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar Tahun 2020			100	97,33	1,01

Tabel 13 menunjukkan bahwa rasio efisiensi seluruh indikator kinerja utama memiliki nilai antara 1,00 s/d 1,04 dengan rata-rata sebesar 1,01 (artinya > 1). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran kinerja BDLHK Pematangsiantar sudah efisien.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan indikator kegiatan yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BP2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi, untuk menjamin kinerja yang optimal

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM terdiri dari kegiatan Layanan Dukungan Manajemen pada Balai Diklat LHK, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dan Layanan Perkantoran. Seluruh kegiatan fisik terlaksana 100 %.

b. Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK (660 orang)

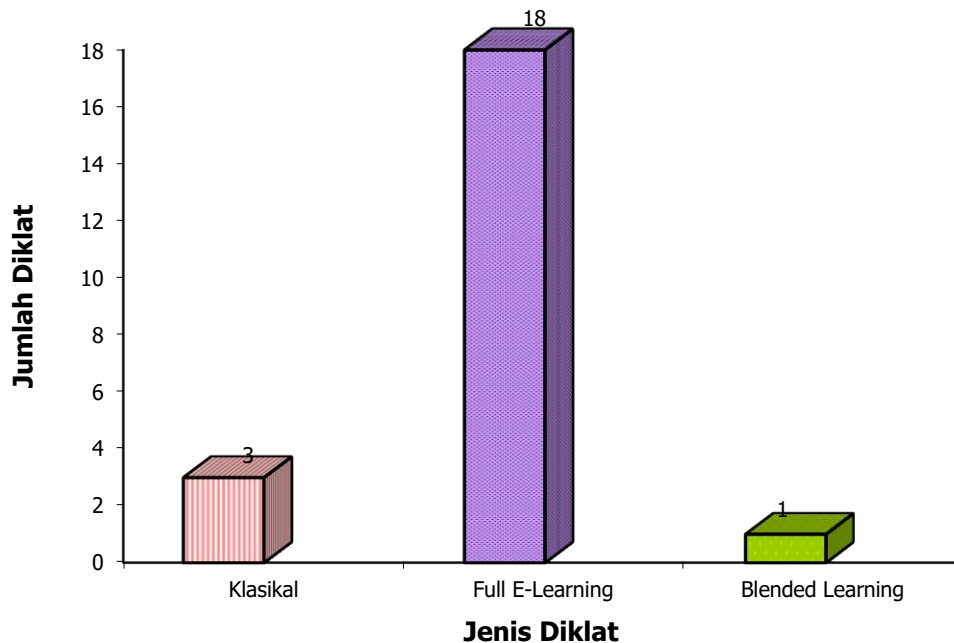
Pada penetapan kinerja Tahun 2020, target peningkatan kapasitas jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang dilaksanakan melalui diklat adalah 330 orang. Akan tetapi, pada saat terjadi Pandemi Covid-19 dilakukan revisi anggaran, yang menyebabkan perubahan volume/satuan pada beberapa komponen utama anggaran. Jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang dilaksanakan melalui diklat bertambah menjadi 660 orang. Pada pelaksanaannya, jumlah SDM yang mengikuti diklat adalah sebanyak 669 orang, yang dananya bersumber dari DIPA BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020. Penyelenggaraan diklat aparatur dan non aparatur LHK ini, dananya tidak hanya bersumber dari DIPA BDLHK Pematangsiantar. Ada beberapa diklat kerja sama yang dananya bersumber dari instansi lain. Realisasi jumlah peserta diklat Tahun 2020 yang dananya bersumber dari DIPA BDLHK Pematangsiantar serta jumlah peserta diklat kerja sama disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Realisasi diklat yang bersumber dari DIPA BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020

No.	Nama Diklat	Lama Diklat (Hari)	Peserta (orang)				Waktu Pelaksanaan
			Rencana	Realisasi		Jlh	
				L	P		
1	Teknik Budidaya Lebah Madu (NAP) (K)	6	30	30	0	30	10-15 Pebruari 2020
2	Teknik Pembuatan Kompos dan Bokashi Pola 50 JP (NAP) (K)	6	30	28	2	30	24-29 Pebruari 2020
3	Pengelolaan SDAHL Bagi Tokoh Masyarakat Pola 80 JP 9 (NAP) (K)	10	30	26	4	30	2-12 Maret 2020
4	Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang I Akt 1 (F)	4	30	29	1	30	27 -30 April 2020
5	Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang I Akt 2 (F)	4	30	25	5	30	27 -30 April 2020
6	Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang II Akt 3 (F)	4	30	23	5	28	5-9 Mei 2020
7	Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang II Akt 4 (F)	4	30	29	1	30	5-9 Mei 2020
8	Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang III Akt 5 (F)	4	30	25	5	30	12-15 Mei 2020
9	Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang III Akt 6 (F)	4	30	29	1	30	12-15 Mei 2020
10	Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang IV Akt 7 (F)	4	30	27	2	29	3 -6 Juni 2020
11	Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang IV Akt 8 (F)	4	30	26	6	32	3 -6 Juni 2020
12	Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang V Akt 9 (F)	4	30	22	6	28	9 -12 Juni 2020
13	Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang V Akt 10 (F)	4	30	21	3	24	9 -12 Juni 2020
14	Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang VI Akt 11 (F)	4	30	37	1	38	16-19 Juni 2020
15	Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang VI Akt 12 (F)	4	30	36	4	40	16-19 Juni 2020
16	SIG Berbasis Ponsel Angkatan I (F)	4	30	26	4	30	13-16 Juli 2020
17	SIG Berbasis Ponsel Angkatan II (F)	9	30	23	7	30	18-26 Agustus 2020
18	Budidaya Lebah Trigona (F)	7	30	26	4	30	25-31 Agustus 2020

No.	Nama Diklat	Lama Diklat (Hari)	Peserta (orang)				Waktu Pelaksanaan
			Rencana	Realisasi		Jlh	
				L	P		
19	Teknik Pengolahan Bambu (F)	6	30	23	7	30	3-8 Septmber 2020
20	Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Masyarakat Peduli Api (F)	6	30	23	7	30	3-8 Septmber 2020
21	Resolusi Konflik Sumber Daya Alam (F)	6	30	25	5	30	9-14 September 2020
22	Pembuatan Pupuk Bokashi (B)	6	30	17	13	30	16-21 September 2020
TOTAL		-	660	576	93	669	

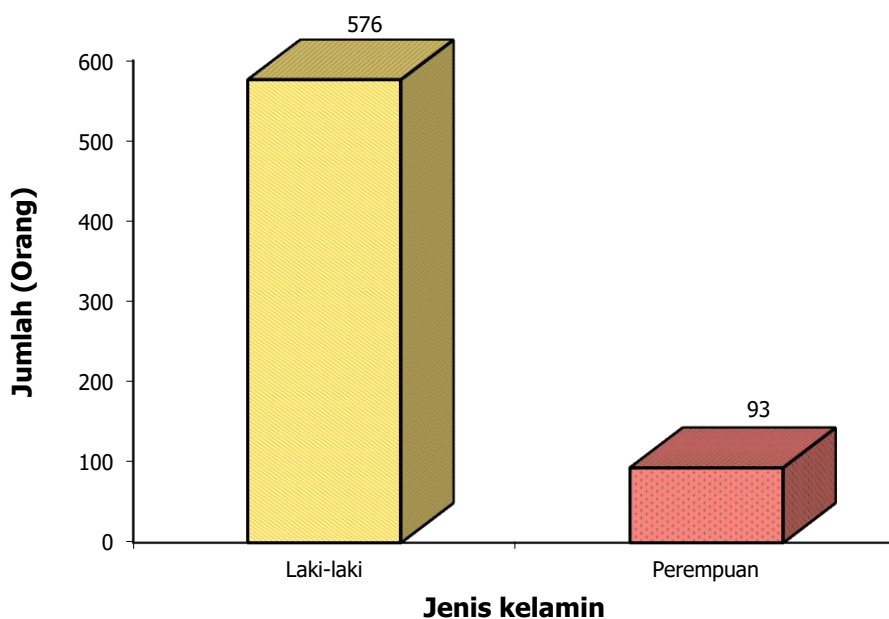
Keterangan: K : Klasikal; F : Full E-Learning; B : Blended Learning



Gambar 8. Grafik Perbandingan Jumlah Diklat Klasikal, Full E-Learning, Blended Learning

Tabel 15. Peserta diklat di BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin

Klasikal (K)		Full E-Learning (F)		Blended Learning		Jumlah		Total
L	P	L	P	L	P	L	P	
84	6	475	74	17	13	576	93	669



Gambar 9. Grafik peserta Diklat di BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020 berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 16. Realisasi diklat kerjasama pada BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020

No.	Nama Diklat	Peserta		Waktu Pelaksanaan	Lama Pelaksanaan (Hari)	Sumber Dana	Kerja Sama dengan Instansi
		Akt	Org				
1	Teknik Dalkarhutla Bagi Pemegang IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman/Restorasi Ekosistem (K)	1	40	16-21 Maret 2020	6	PT. TPL	APHI Sumut-Aceh dan PT. TPL, Tbk
2	Survei Kepadatan dan Monitoring Populasi Orang Utan Angkatan I (K)	1	24	19-24 Oktober 2020	6	Yayasan Ekosistem Lestari	Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Yayasan Ekosistem Lestari
3	Survei Kepadatan dan Monitoring Populasi Orang Utan Angkatan II (K)	1	30	7-12 Desember 2020	6	Yayasan Ekosistem Lestari	Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Yayasan Ekosistem Lestari
4	GANIS PHPL Pengujian Kayu Bulat (B)	1	21	8-23 Desember 2020	16	Dana pribadi peserta	BPMP Wilayah II Medan dan APHI Sumut-Aceh
TOTAL		4	115				

Keterangan: K : Klasikal; F : Full E-Learning; B : Blended Learning

Diklat kerja sama dilegalitaskan dengan adanya Surat Perjanjian Kerja sama antara BDLHK Pematangsiantar dengan instansi bersangkutan. Penyelenggaraan diklat di era Pandemi Covid-19 dilaksanakan secara virtual yaitu *full e-learning dan blended learning*. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pelaksanaan diklat di BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020:



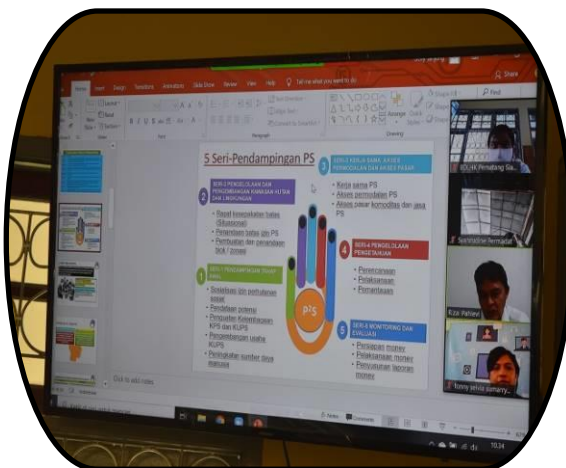
Gambar 10. Diklat Teknik Budidaya Lebah Madu



Gambar 11. Diklat Teknik Pembuatan Kompos dan Bokashi Pola 50 JP



Gambar 12. Diklat Pengelolaan SDAHL Bagi Tokoh Masyarakat Pola 80 JP



Gambar 13. Pelatihan Pendampingan Program Perhutanan Sosial Paska Ijin Gelombang III Angkatan 5 dan 6



Gambar 14. Diklat Teknik Dalkarhutla Bagi Pemegang IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman/Restorasi Ekosistem



Gambar 15. Diklat GANIS PHPL Pengujian Kayu Bulat

Hal-hal yang menyangkut hak kepegawaian baik itu kenaikan pangkat/golongan, dan mutasi pegawai pada Tahun 2020 berjalan baik seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Daftar Pegawai Mutasi Tahun 2020

No.	Nama	Mutasi dari	Mutasi ke
1	Deddy Franklin Siahaan, S.Hut	Balai Diklat LHK Pematangsiantar	BPDASHL Asahan Barumun Pematangsiantar
2	Harry Leo Niko Sinaga, SE., M.Ak	SMKN Manokwari	Balai Diklat LHK Pematangsiantar

Tabel 18. Daftar Pegawai yang mendapat kenaikan pangkat pada Tahun 2020

No.	Nama	Pangkat/Golongan Terakhir	Pangkat/Golongan Baru
1	Dewi Septika Yulia	Penata Muda/III/a	Penata Muda Tk. I/III/b
2	Efendi	Pengatur Tk. I/II/d	Penata Muda/III/a

c. Berkembangnya Pengelolaan KHDTK sebagai sarana pembelajaran diklat (66,50 Poin)

Berkembangnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan ditandai dengan terlaksananya kegiatan pendukung, yaitu:

- ✓ Honorarium Tenaga Bakti Rimbawan
- ✓ Operasional KHDTK
- ✓ Patroli Pengamanan KHDTK
- ✓ Pemeliharaan Demplot
- ✓ Pengembangan Ekowisata Tahap I
- ✓ Pembentukan Kelompok Tani, 2 Kegiatan
- ✓ Pengelolaan Arboretum
- ✓ Pembuatan Demplot Bambu
- ✓ Survei Pendahuluan Burung Rangkok
- ✓ *In-House Training* GPS Bagi Pengelolaan KHDTK
- ✓ Kegiatan Peduli Covid-19 untuk Masyarakat Sekitar KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh
- ✓ Pembekalan Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan Asap Cair/Cuka Kayu sebagai Disinfektan Alami dalam Pencegahan Covid-19

- ✓ Kegiatan Padat Karya Pengelolaan KHDTK dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19



Gambar 16. Pembentukan Kelompok Tani



Gambar 17. Survei Pendahuluan Burung Rangkok



Gambar 18. *In-House Training* Pengujian Getah



Gambar 19. Pembekalan Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan Asap Cair/Cuka Kayu sebagai Disinfektan Alami dalam Pencegahan Covid-19

Pada penetapan kinerja Tahun 2020, target peningkatan kapasitas jumlah generasi muda lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui pelatihan masyarakat adalah sebanyak 150 orang. Pada pelaksanaannya, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan adalah sebanyak 150 orang, yang dananya bersumber dari DIPA BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020. Pelatihan masyarakat ini dilaksanakan dengan metode *Full E-Learning* dan *Blended Learning*. Realisasi jumlah peserta pelatihan masyarakat Tahun 2020 yang dananya bersumber dari DIPA BDLHK Pematangsiantar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19. Realisasi pelatihan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas jumlah generasi muda lingkungan hidup Tahun 2020

No.	Jenis Diklat	Rencana		Realisasi			Lama Diklat (hari)	Waktu Pelaksanaan
		Akt	Pst (org)	Akt	Pst (Org)			
					Lk	Pr		
1	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) Berkesadaran Hukum (F)	1	30	1	22	0	5	4-8 Agustus 2020
2	Pengolahan Sampah Organik Untuk Budidaya Magot Black Soldier Fly Angkatan I (F)	1	30	1	19	11	15	11-24 Agustus 2020
3	Pengolahan Sampah Organik Untuk Budidaya Magot Black Soldier Fly Angkatan II (F)	1	30	1	20	14	10	25 Agustus-3 September 2020
4	Pengukuran dan Pemetaan Partisipatif Berbasis Ponsel (B)	1	30	1	22	8	9	9-17 September 2020
5	Teknik Pembuatan Cuka Kayu/Bambu (Wood/Bamboo) sebagai Disinfektan (B)	1	30	1	25	9	4	22-26 September 2020
TOTAL		5	150	5	108	42	-	

Keterangan: K : Klasikal; F : *Full E-Learning*; B : *Blended Learning*



Gambar 20. Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Partisipatif Berbasis Ponsel

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2020, telah diterbitkan Surat Pengesahan DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pematangsiantar Tahun Anggaran 2020 Nomor: Nomor: SP.DIPA-029.08.2.237640/2020 Tanggal 12 Nopember 2020 dengan pagu defenitif sebesar Rp. 12.846.640.000,- (Dua belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Pagu tersebut mengalami penurunan pada Bulan April 2020 menjadi Rp. 11.353.440.000,- (Sebelas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Sumber dana DIPA tersebut terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 10.913.440.000,- dan PNP sebesar Rp. 440.000.000,-. Realisasi anggaran BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020 tersaji dalam Tabel 21.

Tabel 20. Realisasi anggaran BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Realisasi		% Realisasi Fisik
				Keuangan	%	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BP2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi, untuk menjamin kinerja yang optimal				
		a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	209.780.000	209.490.833	1,85	1,85
		b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	350.000.000	349.984.940	3,08	3,08
		c. Layanan Perkantoran	8.900.000.000	8.598.079.339	75,73	75,73
2	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur Non LHK	SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK Meningkatkan Kapasitasnya	933.660.000	932.491.964	8,21	8,22
		Nilai KHDTK yang dikelola	600.000.000	599.885.247	5,28	5,28
3	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari	360.000.000	359.999.181	3,17	3,17
TOTAL			11.353.440.000	11.049.931.504	97,33	100

Capaian realisasi keuangan BDLHK Pematangsiantar pada Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 11.049.931.504,-** atau **97,33 %**. Sedangkan realisasi fisik sebesar **100 %**. Pencapaian anggaran secara rinci sampai dengan Desember 2020 tersaji pada lampiran 2.

C. Permasalahan dan Tindak Lanjut

1) Permasalahan

Penyerapan anggaran BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020 tidak dapat terealisasi 100% disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya kelebihan pengalokasian gaji di bagian belanja pegawai, dan adanya kebijakan pemerintah untuk tidak membayarkan Tunjangan Kinerja 13 dan 14.

2) Upaya Tindak Lanjut

Upaya yang telah dilakukan BDLHK Pematangsiantar untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan agar tidak terulang pada tahun selanjutnya, yaitu :

- ✓ Mengusulkan kepada DJA/Kanwil DJPB/Eselon I untuk melakukan revisi guna pengoptimalisasian sisa anggaran yang tidak terserap dari belanja pegawai.
- ✓ Melakukan pengawasan serta pengendalian yang lebih baik.

BAB IV. PENUTUP

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar merupakan perangkat organisasi atau unit kerja setingkat eselon III pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil pengukuran capaian kinerja anggaran menunjukkan bahwa dari pagu anggaran BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020 sebesar Rp. 11.353.440.000,- sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 11.049.931.504,- sehingga capaian kinerja anggaran Balai Diklat LHK Pematangsiantar sebesar 97,33 %. Sedangkan capaian kinerja fisik sebesar 100 %. Hasil pengukuran menunjukkan nilai capaian kinerja BDLHK Pematangsiantar pada Tahun 2020 adalah 97,33 %. Hasil pengukuran nilai efektifitas capaian kinerja BDLHK Pematangsiantar Tahun 2020 adalah 1,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Tahun 2019, efektifitas kinerja Balai Diklat LHK Pematangsiantar mengalami peningkatan, dimana efektifitas capaian kinerjanya pada Tahun 2019 adalah 1,00. Namun demikian, Rasio = 1 ini menunjukkan bahwa efektifitas capaian kinerja tahun berjalan adalah tetap atau sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan hasil pengukuran nilai efisiensi capaian kinerja BDLHK Pematangsiantar pada Tahun 2020 adalah sebesar 1,00 (artinya > 1). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran kinerja BDLHK Pematangsiantar sudah efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BDLHK Pematangsiantar sebagai salah satu UPT BP2SDM pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyelenggarakan program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Laporan Kinerja BDLHK Pematangsiantar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala BDLHK Pematangsiantar kepada Kepala Badan P2SDM atas program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BDLHK Pematangsiantar, yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja kedepan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Simangunsong, S.Hut.T., M.Sc.

**Jabatan : Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pematangsiantar**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Helmi Basalamah, M.M.

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2020

Pihak Pertama,



Pihak Kedua,

Ir. Helmi Basalamah, M.M.
NIP. 19611119 198802 1 001

M. Simangunsong, S.Hut.T., M.Sc.
NIP. 19750520 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMATANGSIANTAR**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja / Rincian Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	90 orang
		Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	210 orang
		Pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	180 orang
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)/Hutan Diklat	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	67 poin (1 unit)
3.	Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan	150 orang

- Kegiatan**
1. Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK
 2. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan
 3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM

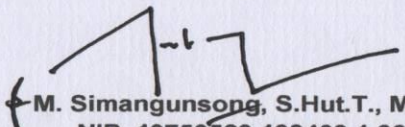
Anggaran
Rp11.697.000.000,-

Jakarta, Desember 2020



Pihak Kedua,
Ir. Helmi Basalamah, M.M.
NIP. 19611119 198802 1 001

Pihak Pertama,


M. Simangunsong, S.Hut.T., M.Sc.
NIP. 19750520 199403 1 001

**TARGET TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMATANGSIANTAR**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja / Rincian Output	Target	B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	90 orang	60 orang	90 orang	90 orang	90 orang
2.		Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	210 orang	600 orang	150 orang	210 orang	210 orang
3.		Pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	180 orang	60 orang	120 orang	180 orang	180 orang
5.	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)/Hutan Diklat	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	67 poin (1 unit)	-	-	-	67 poin (1 unit)
6.	Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan	150 orang	60 orang	120 orang	150 orang	150 orang

Catatan:

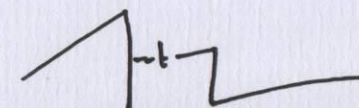
B03 : Target Triwulan I

B06 : Target Triwulan II

B09 : Target Triwulan III

B12 : Target Triwulan IV

Jakarta, Desember 2020



M. Simangunsong, S.Hut.T., M.Sc.

NIP. 19750520 199403 1 001

Lampiran 2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran s.d 31 Desember 2020

SUB KEGIATAN		PAGU (Rp.)	KEUANGAN		%			
					KEUANGAN		FISIK	
			S	R	S	R	S	R
1	2	3	4	5	6	7	8	
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	9.459.780.000	9.459.780.000	9.157.555.112	83,32	80,66	83,32	80,66
5439.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	209.780.000	209.780.000	209.490.833	1,85	1,85	1,85	1,85
051	Penyusunan Rencana Program; dan Penyusunan Anggaran	7.650.000	7.650.000	7.644.000	0,07	0,07	0,07	0,07
052	Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0,11	0,11	0,11	0,11
057	Pengelolaan Kepegawaian	143.290.000	143.290.000	143.206.833	1,26	1,26	1,26	1,26
058	Pelayanan Umum dan perlengkapan	45.840.000	45.840.000	45.640.000	0,40	0,40	0,40	0,40
5439.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	350.000.000	350.000.000	349.984.940	3,08	3,08	3,08	3,08
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas perkantoran	350.000.000	350.000.000	349.984.940	3,08	3,08	3,08	3,08
5439.994	Layanan Perkantoran	8.900.000.000	8.900.000.000	8.598.079.339	78,39	75,73	78,39	75,73
001	Gaji dan Tunjangan	6.398.583.000	6.398.583.000	6.097.815.731	56,36	53,71	56,36	53,71
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.501.417.000	2.501.417.000	2.500.263.608	22,03	22,02	22,03	22,02
5441	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	1.533.660.000	1.533.660.000	1.532.377.211	13,51	13,50	13,51	13,50
5441.001	SDM Aparatur dan non aparatur LHK	933.660.000	933.660.000	932.491.964	8,22	8,21	8,22	8,22
	Diklat Administrasi, Teknis dan Fungsional							
051	Diklat Teknis dan Fungsional	761.833.000	761.833.000	761.524.650	6,71	6,71	6,71	6,71
A	DIKLAT TEKNIK BUDIDAYA LEBAH MADU, 30 ORG, 6 HARI, 1 ANGKATAN (NAP)	112.052.000	112.052.000	111.999.850	0,99	0,99	0,99	0,99
B	DIKLAT TEKNIK PEMBUATAN KOMPOS DAN BOKHASI POLA 50 JPL, 30 ORG, 6HARI, 1 ANGKATAN (NAP)	114.062.000	114.062.000	114.020.150	1,00	1,00	1,00	1,00
C	PELATIHAN TEKNIK PENGOLAHAN BAMBU, 30	27.350.000	27.350.000	27.350.000	0,24	0,24	0,24	0,24

SUB KEGIATAN		PAGU (Rp.)	KEUANGAN		%			
					KEUANGAN		FISIK	
			S	R	S	R	S	R
1		2	3	4	5	6	7	8
	ORG, 3 HARI, 1 ANGK							
D	PELATIHAN RESOLUSI KONFLIK SUMBER DAYA ALAM (SDA), 30 ORG, 4 HARI, 1 ANGK	28.550.000	28.550.000	28.550.000	0,25	0,25	0,25	0,25
F	PELATIHAN SIG BERBASIS PONSEL, 30 ORG, 4 HARI, 1 ANGK	58.900.000	58.900.000	58.899.250	0,52	0,52	0,52	0,52
G	DIKLAT PENGELOLAAN SDAHL BAGI TOKOH MASYARAKAT POLA 80 JPL, 30 ORG, 10 ORG, 1 ANGK	134.019.000	134.019.000	133.967.900	1,18	1,18	1,18	1,18
H	PELATIHAN BUDIDAYA LEBAH TRIGONA SP, 3 HARI 1 ANGK 30 HARI	30.250.000	30.250.000	30.250.000	0,27	0,27	0,27	0,27
I	PELATIHAN ITEKNIK PENCEGAHAN KARHUTLA BAGI MPA, 30 ORG, 5HARI, 1 ANGK	29.650.000	29.650.000	29.650.000	0,26	0,26	0,26	0,26
J	PELATIHAN PEMBUATAN BOKASHI, 30 ORG, 4 HARI, 1 ANGK	35.600.000	35.600.000	35.600.000	0,31	0,31	0,31	0,31
K	PELATIHAN PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL PASKA IJIN, 30 ORG, 4 HARI, 12 ANGK	191.400.000	191.400.000	191.237.500	1,69	1,68	1,69	1,68
054	Pendukung Kediklatan	171.827.000	171.827.000	170.967.314	1,51	1,51	1,51	1,51
A	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEDIKLATAN	26.691.000	26.691.000	26.268.700	0,24	0,23	0,24	0,23
B	PENINGKATAN TENAGA KEDIKLATAN	3.360.000	3.360.000	3.358.000	0,03	0,03	0,03	0,03
C	IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT/IKD	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,13	0,13	0,13	0,13
D	EVALUASI PASCA DIKLAT/EPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,13	0,13	0,13	0,13
E	PENYEMPURNAAN KURIKULUM DAN SILABUS	14.250.000	14.250.000	14.248.250	0,13	0,13	0,13	0,13
F	IN HOUSE TRAINING BAGI TENAGA KEDIKLATAN	20.436.000	20.436.000	20.431.401	0,18	0,18	0,18	0,18
G	PEMBUATAN BANNER SPANDUK/BALIHO DAN PAPAN INFORMASI	21.000.000	21.000.000	20.997.500	0,18	0,18	0,18	0,18
H	KEGIATAN PENCEGAHAN COVID - 19	38.890.000	38.890.000	38.763.963	0,34	0,34	0,34	0,34
I	PENGADAAN LISENSI APLIKASI TELECONFERENCE	3.050.000	3.050.000	3.050.000	0,03	0,03	0,03	0,03
J	PEMBINAAN PEGAWAI BDLHK PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020	10.950.000	10.950.000	10.949.500	0,10	0,10	0,10	0,10
K	OPERASIONAL KEGIATAN VIRTUAL	3.200.000	3.200.000	2.900.000	0,03	0,03	0,03	0,03

SUB KEGIATAN		PAGU (Rp.)	KEUANGAN		%			
					KEUANGAN		FISIK	
			S	R	S	R	S	R
1	2	3	4	5	6	7	8	
5441.003	Jumlah Unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	600.000.000	600.000.000	599.885.247	5,28	5,28	5,28	5,28
	Pengembangan KHDTK Sebagai sarana							
051	Pembelajaran Kediklatan	600.000.000	600.000.000	599.885.247	5,28	5,28	5,28	5,28
A	HONORARIUM TENAGA BAKTI RIMBAWAN	80.600.000	80.600.000	80.600.000	0,71	0,71	0,71	0,71
B	OPERASIONAL KHDTK	138.180.000	138.180.000	138.139.647	1,22	1,22	1,22	1,22
C	PATROLI PENGAMANAN KHDTK	28.800.000	28.800.000	28.800.000	0,25	0,25	0,25	0,25
D	PEMELIHARAAN DEMPLOT	49.200.000	49.200.000	49.198.000	0,43	0,43	0,43	0,43
E	PENGEMBANGAN EKOWISATA TAHAP I	99.531.000	99.531.000	99.531.000	0,88	0,88	0,88	0,88
F	PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI, 2 KEGIATAN	24.500.000	24.500.000	24.492.050	0,22	0,22	0,22	0,22
G	PENGELOLAAN ARBORETUM	9.816.000	9.816.000	9.816.000	0,09	0,09	0,09	0,09
H	PEMBUATAN DEMPLOT BAMBU	20.000.000	20.000.000	19.999.800	0,18	0,18	0,18	0,18
I	SURVEI PENDAHULUAN BURUNG RANGKOK	30.500.000	30.500.000	30.498.500	0,27	0,27	0,27	0,27
	IN HOUSE TRAINING GPS BAGI PENGELOLAAN							
K	KHDTK	15.700.000	15.700.000	15.683.250	0,14	0,14	0,14	0,14
	KEGIATAN PEDULI COVID-19 UNTUK							
L	MASYARAKAT SEKITAR KHDTK	67.975.000	67.975.000	67.975.000	0,60	0,60	0,60	0,60
	PEMBEKALAN TOKOH MASYARAKAT DALAM							
	PEMBUATAN ASAP CAIR/CUKA KAYU SEBAGAI							
	DESINFEKTAN ALAMI DALAM PENCEGAHAN E							
M	COVID-19	6.840.000	6.840.000	6.794.000	0,06	0,06	0,06	0,06
	KEGIATAN PADAT KARYA PENGELOLAAN KHDTK							
	DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN							
N	COVID - 19	28.358.000	28.358.000	28.358.000	0,25	0,25	0,25	0,25
5443.001	SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari	360.000.000	360.000.000	359.999.181	3,17	3,17	3,17	3,17
051	Diklat Teknis Tenaga Pendamping KTH	360.000.000	360.000.000	359.999.181	3,17	3,17	3,17	3,17
A	PELATIHAN TEKNIK PEMBUATAN CUKA KAYU	42.940.000	42.940.000	42.940.000	0,38	0,38	0,38	0,38

SUB KEGIATAN		PAGU (Rp.)	KEUANGAN		%			
					KEUANGAN		FISIK	
			S	R	S	R	S	R
1		2	3	4	5	6	7	8
	BAMBU, 34 ORG, 4HARI, 1 ANGK							
B	PELATIHAN PENGENDALIAN KARHUTLA BAGI MPA BERKESADARAN HUKUM, 22 ORG, 4 HARI, 1 ANGK	18.490.000	18.490.000	18.490.000	0,16	0,16	0,16	0,16
C	PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK UNTUK BUDIDAYA MAGGOT BLACK SOLDIERF LY , 64 ORG, 4 HARI, 2 ANGK	85.470.000	85.470.000	85.470.000	0,75	0,75	0,75	0,75
D	PELATIHAN SIG BERBASIS PONSEL , 30 ORG, 4 HARI, 1 ANGK	31.050.000	31.050.000	31.050.000	0,27	0,27	0,27	0,27
E	IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0,26	0,26	0,26	0,26
F	EVALUASI PASCA DIKLAT	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0,26	0,26	0,26	0,26
G	DUKUNGAN PELATIHAN MASYARAKAT	122.050.000	122.050.000	122.049.181	1,08	1,07	1,08	1,07